

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkah dan rahmat-Nya semata Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow ini memenuhi kewajiban yang di amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyajian Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistem pola baru yang didalamnya memuat unsur – unsur rencana strategik dan unsur – unsur Akuntabilitas kinerja sepanjang tahun 2025 dan merupakan pertanggung jawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow dalam satu tahun berjalan.

Akhirnya penyusunan LKjIP ini disertai dengan harapan, semoga akan menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow untuk selalu meningkatkan kinerjanya di masa masa mendatang.

Lolak, Januari 2026

KEPALA DINAS

MA'RIEF MOKODOMPIT, S.Kom
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19831212 201001 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	2
1.2 Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Perencanaan Strategis.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
2.4 Rencana Kinerja Tahunan.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	16
3.2 Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran.....	19
3.3 Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran.....	37
3.4 Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (*information of technology*).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow diatur dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow. Melalui Peraturan dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (elektronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi atau *electronic government (e-gov)* disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e- Government* yang didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.1 Gambaran Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow terbentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Selanjutnya berdasarkan Pasal (29) Peraturan Bupati Bolang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunann Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan kedudukan dan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Terdiri Dari:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas
2. Kepala Dinas membawahi:
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - c. Bidang Penyelenggaraan *e-government*
 - d. Bidang Persandian dan Statistik
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi kelompok jabatan fungsional.
5. Bidang Penyelenggaran *e-government* dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi kelompok jabatan fungsional.
6. Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi kelompok jabatan fungsional.

1.1.1 Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada table-tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)
1	LAKI-LAKI	17
2	PEREMPUAN	7
	JUMLAH	24

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	Magister (S2)	2
2	Sarjana (S1)	12
3	Sarjana Muda (D3)	3
4	SMA/SMK	7
	JUMLAH	24

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Menurut Jabatan Tahun 2025

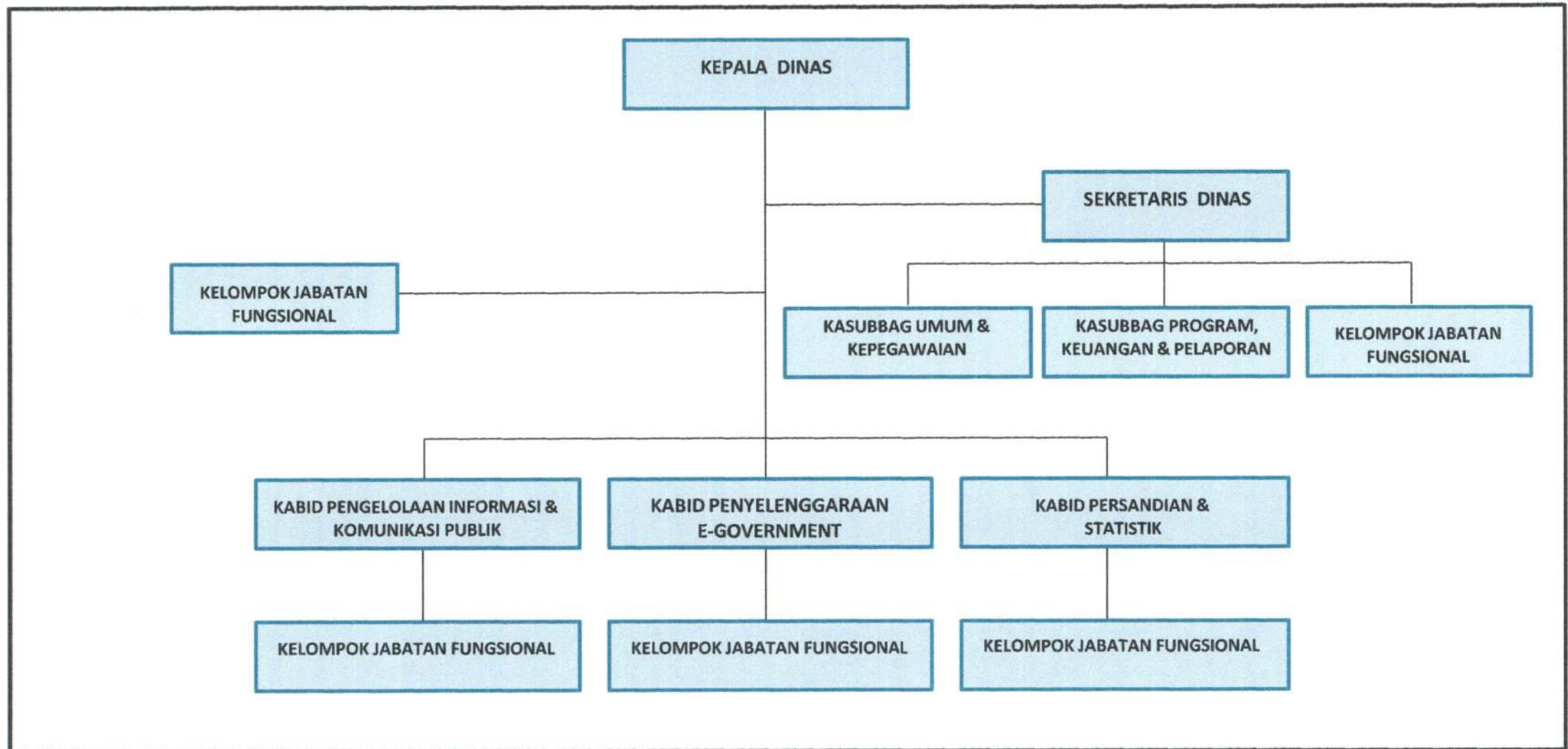
NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kasubbag	2
5	Fungsional	3
	JUMLAH	10

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Pangkat/Golongan Tahun 2025

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	Pembina Utama (IV/e)	-
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
5	Pembina (IV/a)	1
6	Penata Tingkat I (III/d)	5
7	Penata (III/c)	2
8	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6
9	Penata Muda (III/a)	1
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
11	Pengatur (II/c)	1
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
13	Pengatur Muda (II/a)	-
14	Golongan V (PPPK)	6
	JUMLAH	24

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Secara Umum dapat dilihat pada Gambar 1.1, sedangkan daftar pangkat/golongan, kualifikasi pendidikan serta jabatan dapat dilihat pada Tabel 1.5.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

**Tabel 1.5 Daftar Pangkat/Golongan, Kualifikasi Pendidikan dan Status
Jabatan Tahun 2025**

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Kualifikasi Pendidikan	Jabatan
1.	Ma"rief Mokodompit, S.Kom 1931212 201001 1 010	Pembina Tkt. I, IV/b	Sarjana Komputer	Kepala Dinas
2.	Moh. Ridel Syukur, S.Pi 19691201 199903 1 008	Pembina Tkt. I, IV/b	Sarjana Perikanan	Sekretaris
3.	Imran Paputungan, SP 19800905 200902 1 001	Pembina, IV/a	Sarjana Pertanian	Kabid Persandian dan Statistik
4.	Fajrah A.Md 19820618 200604 2 011	Penata Tingkat I, III/d	Sarjan Muda	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunkasi Publik
5.	Feibby Suangi, SS 19820234 201102 1 001	Penata Tingkat I, III/d	Sarjana Sastra	Kepala Bidang Penyelenggaraan E - Goverment
6.	Dewi Sartika Paputungan, SE 19740907 200801 2 007	Penata Tkt I, III/d	Sarjana Ekonimi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.	Munaora Pudi, SE, 19880322 200701 2 001	Penata Tkt I, III/d	Sarjana Ekonomi	Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan
8.	Abdillah Umbola, SIP, MA 19850906 200902 1 001	Penata Tkt I, III/d	Magister Ilmu Pemerintahan	Manggala Informatika
9.	Lukman Bareng, SE 19721214 200212 1 008	Penata Tkt I, III/d	Sarjana Ekonomi	Sandiman
10.	Ruskin Toisi, SE 19710516 200801 1 008	Penata, III/c	Sarjana Ekonomi	Pelaksana
11.	M. Akbar, S.Sos 19681010 201412 1 001	Penata, III/c	Sarjana Sosial	Pelaksana
12.	Aluwin Dilapanga 19670424 199103 1 011	Penata Muda tingkat I III/b	STM	Statistisi
13.	Gunawan Kadengkang, Amd.Te 19811208 201001 1 007	Penata Muda Tkt 1,IIIb	Sarjana Muda Teknik Elektro	Pelaksana
14.	Andrian Masta, A.Md 19771118 201102 1 001	Penata Muda Tkt 1,IIIb	Sarjana Muda Teknik Elektro	Pelaksana
15.	Rusbandy Paputungan, S.Kom 19860530 201903 1 006	Penata Muda Tkt 1,IIIb	Sarjana Komputer	Pelaksana
16.	Rolandy Gonibala, S.Kom 19881210 201903 1 004	Penata Muda Tkt 1,IIIb IIIa	Sarjana Komputer	Pelaksana
17.	Silvana Kawulur, ST 19910417 201903 2 004	Penata Muda Tkt 1,IIIb	Sarjana Teknik	Pelaksana
18.	Agus Putra cahyadi waluyo, ST 19920823 201903 1 008	Penata Muda Tkt 1,IIIb	Sarjana Teknik	Pelaksana
19.	Meitri Ferreto 19800522 201410 1 002	Penata Muda, IIIa	Sarjana Muda	Pelaksana
20.	Yulianty Durandt 19840706 201001 2 008	Pengatur, II/c	SMK	Pelaksana

Untuk daftar PPPK Paruh Waktu Tenaga Honorer, Cleaning Service, penjaga kantor, tenaga Administrasi, dan Tenaga Ahli dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6 PPPK Paruh,CS ,Penjaga Kantor dan Sopir Tahun 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	Ikrar Perdana Laute	Oprator Layanan Oprasional	PPPK Paruh Waktu
2.	Noor Sidiq Paudi	Oprator Layanan Oprasional	PPPK Paruh Waktu
3.	Ifan Lumape	Oprator Layanan Oprasional	PPPK Paruh Waktu
4.	Kandidimus Lako	Oprator Layanan Oprasional	PPPK Paruh Waktu
5.	Troy D. Mokoagow	Oprator Layanan Oprasional	PPPK Paruh Waktu
6.	Wanda Ginobala	Oprator Layanan Oprasional	PPPK Paruh Waktu
7.	Alfito nDona Ginobala	Sopir	
8.	Sharul Paputungan	Penjaga Kantor	
9.	Kartini Paputungan	Petugs Kebersihan	

1.1.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi:

1. Tanah

No	Nama/Jenis	Luas (m ²)	Lokasi	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.490	Desa Lalow, Kec. Lolak	Bersertifikat

2. Gedung/Bangunan

No	Nama/Jenis	Luas (m ²)	Lokasi	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor	478,5	Desa Lalow, Kec. Lolak	Hak Milik
2	Rumah Genset	8,75	Desa Lalow, Kec. Lolak	Hak Milik
3	Bangunan Tower Jaingan	0,9	Desa Lalow, Kec. Lolak	Hak Milik

3. Jaringan

No	Nama/Jenis	Ukuran	Keterangan
1	Jaringan Instalasi Genset	55 m	Baik
2	Jaringan Fiber Optik	21 Titik	Baik

4. Peralatan

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah (Jenis)	Ket
1	Peralatan dan perlengkapan Jaringan	53	Baik
2	Air Conditioner (AC)	20	Baik
3	Kursi/Bangku	73	Baik
4	Meja	35	Baik
5	CCTV	1	Baik
6	Dispenser	2	Baik
7	Filing Besi/Metal/Kabinet	6	Baik
8	FingerPrint	1	Baik
9	Door Acces Fingerprint	1	Baik
10	Genset	2	Baik
11	Handphone	2	Baik
12	PC/Laptop/Notebook	29	Baik
13	Printer/Scanner	9	Baik
14	Lemari	16	Baik
15	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Baik
16	Kendaraan Dinas Roda 2	2	Baik
17	Lemari Es	2	Baik
18	Peralatan Video Cenverance	11	Baik
19	Perlengkapan Kendaraan Dinas TIK	15	Baik
20	UPS	4	Baik

1.2 Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika

1.2.1 Permasalahan Utama

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi public	Belum optimalnya pengelolaan opini public	Belum optimalnya respon OPD terhadap opini Masyarakat
	Belum optimalnya pelayanan pengaduan dari masyarakat	Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan Masyarakat
	Belum optimalnya produk informasi yang termuat di media Informasi	Keterbatasan personel peliput, editor dan redaktur berita, baik berita, foto maupun video

	Belum optimalnya pengelolaan media publikasi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat	Belum secara optimal dapat mengikuti pergeseran selera masyarakat dalam penggunaan media informasi dan komunikasi
		Belum optimalnya pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/ komunitas/ lembaga pegiat media sosial
		Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah
Belum optimalnya Perluasan Pelayanan jaringan internet	Belum optimalnya perluasan jaringan disemua entitas Pemerintahan	Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik
		Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik
	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya komunikasi non Pemerintah	Belum optimalnya pengelolaan jaringan Seluler dengan provider Non Pemerintah
		Belum optimalnya pengelolaan perijinan menara seluler
	Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi dan Persandian	Belum terpenuhinya standar keamanan informasi berskala Internasional/Nasional
		Belum optimalnya standar keamanan data dan Aplikasi
Belum optimalnya Penyelenggaraan pemerintahan yang Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE		Belum terpenuhinya standar pengelolaan Government Chief Information Officer

	Belum optimalnya pengelolaan dan Pengintegrasian Aplikasi	Pembangunan aplikasi belum mengacu pada proses bisnis SPBE
		Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
	Belum optimalnya pengelolaan data dan Statistik Sektoral	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
		Belum optimalnya Pemanfaatan data statistik dan data geospasial

1.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada dua tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kabupaten Bolaang Mongondow jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan informasi
- b. Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media massa masih perlu ditingkan.

- c. Masih terdapat aplikasi pelayanan publik berbasis online yang belum terintegrasi
- d. Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan.
- e. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2025 sangat terkait dengan pencapaian visi dan misi organisasi dengan mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow.

Maka visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 adalah :

“ Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan Mandiri Sebagai Lumbung Pangan Indonesia timur “

Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 tersebut dirumuskan melalui 5 misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN.
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung satu misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN satu tujuan Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governace*), terjaminnya penegakan hukum terhadap praktek kolusi,

korupsi dan nepotisme (KKN) yang didukung oleh lembaga legislatif daerah yang kuat serta legitimasi penuh masyarakat.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 : “ *Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan Mandiri Sebagai Lumbung Pangan Indonesia timur* “, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolmong memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran yaitu:

Tujuan

Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran

- 1. Meningkatkan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Menghasilkan
- 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN			
						PADA TAHUN KE			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Keterbukaan Informasi	50	Meningkatkan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Menghasilkan Layanan Informasi Yang Berkualitas	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	40	45	50	55

		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penilaian Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dan Reformasi Birokrasi	2.1	2.3	2.5	2.6
--	--	--	-----	--	---	-----	-----	-----	-----

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 - 2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Program Pendukung	Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Menghasilkan Layanan Informasi Yang Berkualitas	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	50	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.845.093.767
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.048.394.893

				Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	41.184.400
				Program Penyelenggaraan Persandian	25.115.246

Gambaran secara utuh bagaimana Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula	Target
1	Meningkatnya pemberitaan dan informasi pemerintahan daerah	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyelenggaraan imformasih public,mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerinta daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasih public mengetahui kebijakan dan program prioritas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bagi Jumlah penduduk dikali Seratus persen	83%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan satu data Indonesia (SDI dan Data Statistik Sektoral)	Persentase organisasi perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah.	Jumlah OPD yang Menggunakan Data statistic di bagi Jumlah OPD di kali serratus persen	30%
3	Meningkatnya system keamanan informasi	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan Keamanan siber dan sandi di bagi Jumlah OPD dikali serratus persen	70%
4	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien	Indeks system Pemerintahan Berbasis Elektronik	$\frac{\text{Skor SPBE} \times 100}{\text{Target nilai SPBE}}$	2,75%

2.4 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2024 ini juga merupakan gambaran kegiatan dan output Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula	Target
1	Meningkatnya pemberitaan dan informasi pemerintahan daerah	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyelenggaraan imformasih public,mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerinta daerah Kabupaten/Kota		83%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan satu data Indonesia (SDI dan Data Statistik Sektoral)	Persentase organisasi perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah.		30%
3	Meningkatnya system keamanan informasi	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah		70%
4	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien	Indeks system Pemerintahan Berbasis Elektronik		2,75%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

a. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

> 85	= Sangat berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan **“Metode Rata-Rata Data Kelompok”**. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai rata-rata (*mean*) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori ***sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.***

3.2 Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas.

Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

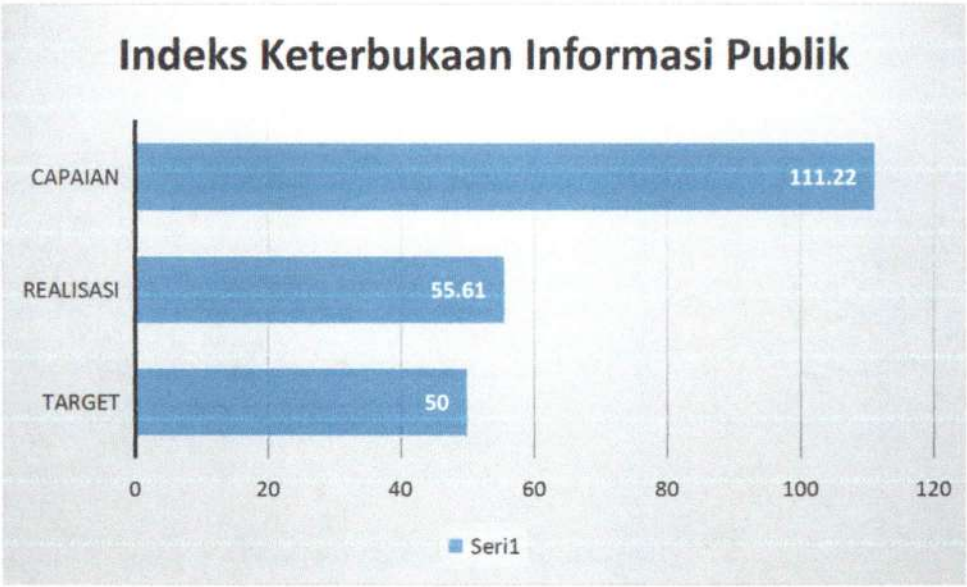
Pengukuran capaian kinerja sasaran : “Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Menghasilkan Layanan Informasi Yang Berkualitas ” dengan Indikator Sasaran Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

$$\begin{aligned} &= \text{Skor } \underline{\text{indeks Keterbukaan Informasi Publik}} \times 100 \\ &\quad \text{Target Indeks Keterbukaan Informasi Publik} \\ &= \frac{55,61}{50} \times 100 \end{aligned}$$

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	50	55,61	111,22%

Indeks keterbukaan informasi publik Tahun 2025 memperoleh nilai Realisasi 55,61 dari target 50 sehingga Capaian Kinerja memperoleh nilai 111,22 dengan kategori “Sangat Berhasil”.



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

N O	INDIKATOR	2024			2025			TARG ET AKHI R RENS TRA
		TA RG ET	REALISASI	CAPA IAN	TAR G ET	REALISA SI	CAPA IAN	
1	Indeks Keterbu ka an Informasi Publik	45	29,44	65,42 %	50	55,61	111,22%	55

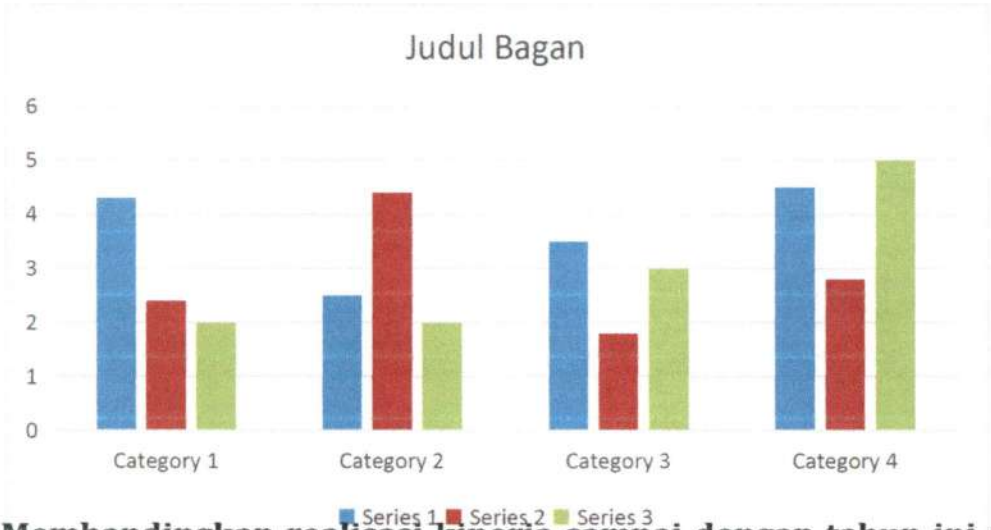
Capaian Indeks Keterbukan Informasi Publik berdasarkan Tabel diatas, pada tahun 2024 memperoleh realisasi 29,44 dari target 45 dengan capaian 65,42% sedangkan pada tahun 2025 realisasi kinerja mengalami peningkatan yaitu 55,61 dari target 50 dengan capaian 111,22%.



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja			2023		2024		2025	
	Tar get	Realis asi	Targ et	Realisa si	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	35	Tidak Ada Penilaian (Covid-19)	40	76,64	45	29,44	50	55,61

Pada Tahun 2022 Komisi Informasi Pusat Tidak Melakukan Penilaian karena Pandemi Covid-19, Kemudian pada tahun 2023 memperoleh realisasi 76,64 dari target 40 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu realisasi 29,44 dari target 45 sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari target 50 dengan realisasi 55,61 .



4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Standar Nasional

Perbandingan Antara Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Nasional Dapat dilihat Pada Tabel berikut.

	Prov Sulut	Nasional

Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55,61	75,65
-------------------------------------	-------	-------



Realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pada Tahun 2025 memperoleh nilai 55,61 untuk Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan untuk Nilai Nasional memperoleh 76,65.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara (KIP) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 52/KEP/KIP/VII/2024 tentang Petunjuk Umum Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024.

Adapun beberapa faktor penyebab menurunnya Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik antara lain sebagai berikut:

1. Belum Menetapkan Daftar Informasi Publik
2. Belum Optimalnya Kinerja PPID
3. Belum menyediakan publikasi informasi-informasi yang bersifat publik seperti data perbendaharaan atau inventaris Barang Milik Daerah.
4. PPID belum melaksanakan Koordinasi secara rutin.

Melihat beberapa faktor penyebab menurunnya Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik, beberapa solusi alternative yang harus dilakukan guna mendukung meningkatnya Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi PPID secara rutin.
2. Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dimutakhirkan.
3. Menyediakan Publikasi informasi-informasi melalui media komunikasi publik.
4. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggaranya akan semakin tinggi.

Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerja. Banyak sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran yang telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Pada Tahun 2025, Anggaran yang disediakan untuk Program Kegiata mendukung Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik berjumlah Rp. 1.743.697.397. Capaian Kinerja pada Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik memperoleh 111,22 % dengan Capaian Anggaran 89,68% sehingga tingkat efisiensi -34,07.

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi public	Indeks keterbukaan informasi publik	111,22	89,68	21,54

7. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada tabel berikut:

PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (2025)	REALISASI	PRESENTASE
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.650.956.535	1.472.152.182	89,1%
Relasi Media	23.581.378	23.452.600	99,45%
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	11.981.484	11.470.250	95,73%
Pelayanan Informasi Publik	57.178.000	56.759.600	99,27%
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.743.697.393	1.563.834.632	89,17%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Realisasi anggaran pada Program Informasi dan Komunikasi Publik yang menunjang pencapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik memperoleh persentase 89,17% yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.743.697.393 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.563.834.643.

Sasaran 2 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pengukuran capaian kinerja sasaran : “Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik” dengan indikator sasaran Indeks SPBE , dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai Indeks SPBE}}{\text{Target Nilai SPBE}} \times 100$$
$$= \frac{2,73}{2,3} \times 100$$

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks SPBE	2.5	0,00	0,00%

Capaian Indeks SPBE berdasarkan Tabel diatas Pada Tahun 2025 dari perhitungan Persentase Indeks SPBE pada tahun 2025 Dari Target 0,00 terealisasi sebesar 0,00 dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah 0,00%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

NO	INDIKAT OR	2024		2025			TARGET AKHIR RENSTRA
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Indeks SPBE	2,3	2,73	2.5	0,00	0,00 %	2.6

Berdasarkan Tabel diatas capaian Indeks SPBE pada Tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,00 dari target 2,5 dengan capaian 0,00% sedangkan pada tahun sebelumnya memperoleh nilai Indeks SPBE 2,73 dari target 2,3.

3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Penetapan Indeks SPBE sebagai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika baru ditetapkan sejak tahun 2025 sehingga data yang dapat disajikan adalah data mulai tahun 2025 sebagaimana tertuang pada table dibawah ini.

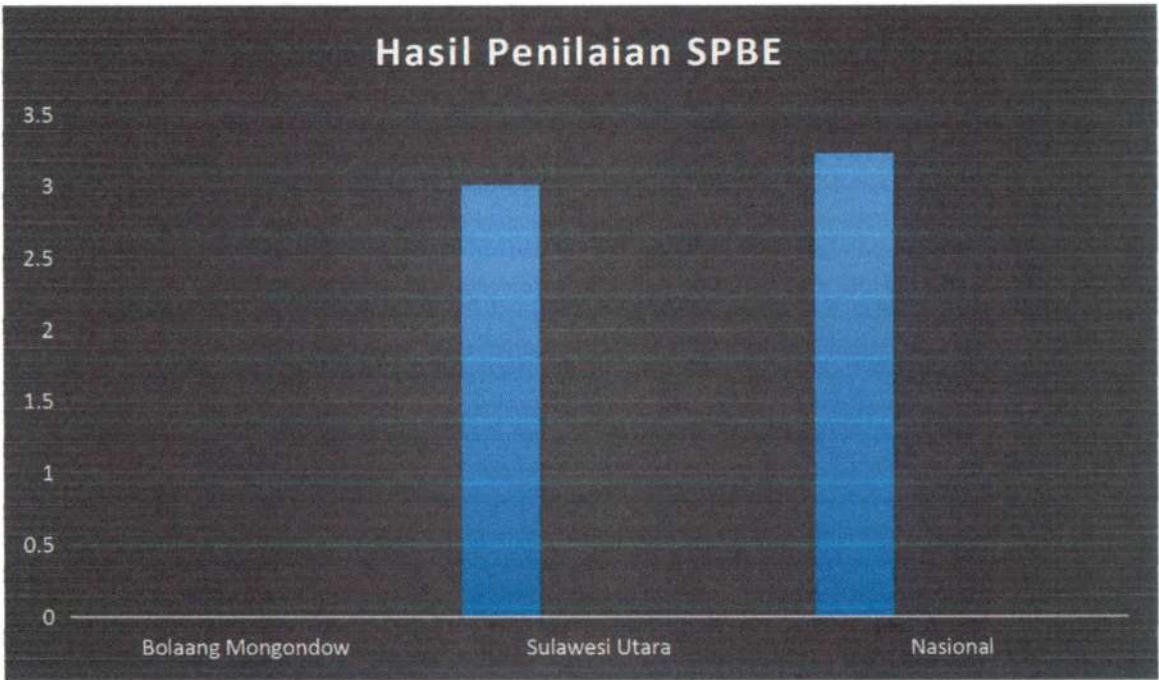
Indikator Kinerja	2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks SPBE	2,3	2,73	2,5	0,00

berdasarkan Tabel diatas, Capaian Indeks SPBE Tahun 2024-2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Mengalami Penurunan yaitu pada tahun 2024, adapun capaian tertinggi diperoleh pada Tahun 2024 sebesar 2,73 dengan predikat “Baik” sedangkan pada tahun 2025 memperoleh nilai 0,00 dengan predikat “Kurang”.

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025		
	Kab Bolmong	Prov Sulut	Nasional
Indeks SPBE	0,00	3,01	3,23

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang “Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025”, Capaian Indeks SPBE kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh nilai **0,00** dengan Predikat **“KURANG”**, sedangkan Capaian Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara memperoleh nilai 3,01 dan nilai Indeks SPBE Nasional Memperoleh Nilai 3,23.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta alternative Solusi yang telah dilaksanakan.

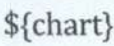
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	0,00
Domain Kebijakan SPBE	0,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	0,00
Domain Tata Kelola SPBE	0,00
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	0,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	0,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	0,00
Domain Manajemen SPBE	0,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	0,00
<i>Audit TIK</i>	0,00
Domain Layanan SPBE	0,00
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	0,00
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	0,00

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah dengan adanya Kebijakan Internal Manajemen Data dan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi.

Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat belum adanya kebijakan internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih belum memiliki kebijakan internal terkait Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE belum ada yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini belum terlihat adanya penerapan yang menjadi kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih belum memiliki dokumen terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, penerapan

Rencana dan Anggaran SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE. Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih belum disusun kembali dokumen untuk tahun 2024-2029. Penerapan Rencana dan Anggaran SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow belum terdapat data dukung terkait penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE. Penerapan Inovasi Proses Bisnis SPBE belum terdapat dokumen peta proses bisnis yang sesuai dengan PermenPANRB No.19 Tahun 2018 (belum terlihat adanya peta sub proses sampai peta lintas fungsi).

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah dengan adanya penerapan Layanan Jaringan Intra dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini belum terlihat adanya penerapan yang menjadi kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih belum memiliki dokumen terkait Pembangunan Aplikasi SPBE dan Layanan Pusat Data, dimana tidak ditemukan adanya dokumentasi penerapannya pada bukti dukung yang disampaikan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya penerapan yang menjadi kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penerapan Tim Koordinasi SPBE telah memiliki Tim Koordinasi SPBE, namun masih berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kominfo, Keputusan Bupati

terkait Tim Koordinasi SPBE masih berupa draft. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan Kolaborasi Penerapan SPBE masih dilaksanakan sewaktu-waktu atau tanpa perencanaan.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana belum adanya dokumen Peta Rencana SPBE yang berisikan muatan Manajemen yang menjadi dasar dari penerapan Manajemen SPBE.

Kekuatan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya penerapan yang menjadi kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih belum memenuhi penerapan semua indikator pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, dimana belum tersedianya dokumen Peta Rencana SPBE yang berisikan muatan Manajemen yang menjadi dasar pijakan dari penerapan Manajemen SPBE.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana belum memiliki dokumen Peta Rencana SPBE yang berisikan muatan Audit TIK yang menjadi dasar dari penerapan Aspek Audit TIK.

Kekuatan

Pada Aspek Audit TIK ini belum terlihat adanya penerapan yang menjadi kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih belum melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE yang terencana. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow belum memiliki Peta Rencana SPBE yang

berisikan muatan Audit TIK yang menjadi dasar pijakan dari penerapan Aspek Audit TIK.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah dengan adanya penerapan Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya penerapan Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Kinerja Pegawai yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Penerapan Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, dan Layanan Keuangan dibuktikan dengan digunakannya Aplikasi Umum Berbagi Pakai SIPD. Penerapan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dibuktikan dengan digunakannya Aplikasi Umum Berbagi Pakai SPSE. Penerapan Layanan Kepegawaian dibuktikan dengan digunakannya Aplikasi Umum Berbagi Pakai SIMPEGNAS, SIASN, dan MyASN. Penerapan Layanan Kearsipan Dinamis dibuktikan dengan digunakannya Aplikasi Umum Berbagi Pakai Srikandi. Penerapan Layanan Kinerja Pegawai dibuktikan dengan digunakannya Aplikasi Umum Berbagi Pakai Srikandi SIMPEGNAS (eKinerja).

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih belum memenuhi penerapan terkait Layanan Pengawasan

Internal Pemerintah, dimana belum adanya bukti dukung yang terkait dengan penerapan Layanan tersebut.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik berbasis Elektronik sudah semua dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya penerapan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3 yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Penerapan Layanan Publik Sektor 1 dibuktikan dengan digunakannya Aplikasi Umum Berbagi Pakai OSS. Aplikasi yang digunakan mendukung penerapan RB Tematik.

Penerapan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dibuktikan dengan digunakannya Aplikasi Umum Berbagi Pakai SP4N LAPOR. Penerapan Layanan Data Terbuka dibuktikan dengan digunakannya Aplikasi Umum Berbagi Pakai Satu Data dan Aplikasi For D One. Penerapan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dibuktikan dengan digunakannya Aplikasi Umum Berbagi Pakai JDIH. Penerapan Layanan Publik Sektor 2 dibuktikan dengan digunakannya Aplikasi Umum Berbagi SIAK terpusat. Penerapan Layanan Publik Sektor 3 dibuktikan dengan digunakannya Aplikasi Umum SIMRSGOS dari Kementerian Kesehatan yang terintegrasi dengan Aplikasi JKN.

Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak memiliki kelemahan dalam penerapan Aspek Layanan Publik berbasis Elektronik.

I. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Saran perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan/Keputusan Bupati terkait penyelenggaraan SPBE yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aspek Perencanaan Strategis SPBE perlu segera menyusun dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana dan Anggaran SPBE perlu dilakukan proses dan dokumentasi kegiatan perencanaannya dan seluruh rencana dan anggaran dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK. Penyusunan dokumen peta proses bisnis yang sesuai dengan PermenPANRB No.19 Tahun 2018 perlu segera dilakukan.
- c. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum diterapkan terkait pembangunan aplikasi SPBE dan layanan pusat data perlu mulai dilakukan penerapannya secara bertahap. Dokumentasi tahapan pembangunan aplikasi SPBE bisa mulai dilakukan sesuai dengan ketentuan tahapan pembangunan yang ada. Layanan pusat data mulai bertahap dibangun dan/atau memanfaatkan layanan pusat data nasional pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga bias terjamin penyimpanan dan ketersediaan data bagi Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow dan masyarakat.
- d. Aspek Penyelenggara SPBE perlu segera menetapkan Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan oleh Bupati dan melaksanakan seluruh tugas sesuai program kerjanya. Kolaborasi Penerapan SPBE perlu disusun perencanaannya dan dilaksanakan sesuai perencanaan tersebut.
- e. Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK perlu ada inisiatif untuk mulai bertahap menerapkan berdasarkan perencanaan yang ada pada dokumen peta rencana SPBE yang akan dibuat. Peta rencana perlu segera dibuat sehingga Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK ini bisa dilakukan.

- f. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik sudah baik penerapannya dengan menggunakan aplikasi umum berbagi pakai, namun masih ada layanan yang belum menggunakan. Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai untuk layanan yang belum menerapkan bias segera dilakukan sehingga bisa meningkatkan efektifitas pemberian layanan dan nilai kematangan. Penggunaan aplikasi berbagi pakai ini tidak memerlukan proses pembangunan lagi sehingga lebih mudah untuk mewujudkan penerapan dari layanannya. Proses reviu dan evaluasi secara periodik serta ditindaklanjuti perlu dilakukan sehingga penerapannya lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dari Kabupaten Bolaang Mongondow.
- g. Aspek Layanan Publik berbasis Elektronik sudah baik penerapannya dengan menggunakan aplikasi umum berbagi pakai, namun perlu melakukan proses reviu dan evaluasi secara periodic sehingga penerapannya lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dari Kabupaten Bolaang Mongondow.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggaranya akan semakin tinggi.

Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerja. Banyak sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N o	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0,00	98	-98

Berdasarkan Tabel diatas, Indikator Sasaran Kinerja untuk Indeks Sisem Pemerintahan Berbasis Elektronik Memperoleh Capaian Kinerja 0,00% dan Capaian Anggaran sebesar 98% sehingga Tngkat Efisiensi yg diperoleh yaitu -98. Jika dilihat dari Capaian Kinerja, Indikator Sasaran Kinerja untuk Indeks Sisem Pemerintahan Berbasis Elektronik memperoleh predikat “Tidak Berhasil”.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.182.858.638	2.145.940.001	98
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	3.400.000	-	0,00
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.179.458.638	2.145.940.001	98,46

Terdapat Satu Program yang mendukung pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu Program Aplikasi Informatika dengan Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.182.858.638 dan Realisasi sebesar Rp. 2.145.940.001 sehingga memperoleh Persentase sebesar 98%.

3.3 **Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran**

Pencapaian target kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

1. **Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian
		Target	Realisasi	%	
Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	50	55,61	111,22	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel diatas bisa disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 pada sasaran tersebut memperoleh nilai 55,61 dari target 50 dengan persentase capaian sebesar 111,22 sehingga masuk pada kategori **“SANGAT BERHASIL”**.

2. Hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian
		Target	Realisasi	%	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5	0,00	0,00	Tidak Berhasil

Berdasarkan Tabel diatas bisa disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 pada sasaran tersebut memperoleh nilai Indeks SPBE 0,00 dari target 2,5 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00 sehingga masuk pada kategori **“TIDAK BERHASIL”**.

3.4 Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

3.4.1 Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Bolaang Mongondow tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

KODE REKENING	URAIAN	2025			2024	
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	%
5	BELANJA DAERAH	7.297.966.274.93	6.810.837.472,00	93,33	8.444.609.558	98,69

5.1	BELANJA OPERASI	6.779.725.663.00	6.316.205.046.00	93,16	8.237.799.558	98,73
5.2	BELANJA MODAL	518.240.631.93	494.632.426.00	95,44	206.810.000	96,79

Berdasarkan Data tersebut, Realisasi Anggaran Pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami penurunan yaitu Pada Belanja Operasi Tahun 2024 sebesar 98,73% menurun menjadi 93,16% di tahun 2025 dan Pada Belanja Modal Tahun 2024 sebesar 96,79% menjadi 95,44% di tahun 2025, sehingga Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan pada Dinas Komunikasi dan Informatika menurun dari tahun 2024 sebesar 98,69% menjadi 93,33% di tahun 2025, Penyebab Menurunnya Realisasi yaitu bebrapa kegiatan terdapat efisiensi anggaran.

3.4.2 Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Tahun 2025

Capaian Kinerja pada realisasi anggaran untuk masing-masing program /kegiatan ditunjukkan seperti pada tabel berikut.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		REALISASI	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.318.421.650	2.186.733.823	94,32
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.259.920.526	2.132.140.690	94,35
Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.363.655	48.446.434	94,32
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.137.469	6.146.699	86,12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.450.846	147.223.388	99,17
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.444.846	5.220.000	80,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.006.000	142.003.388	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.165.868	676.957.553	85,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.238.000	65.564	39,20
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	487.427.868	476.893.150	97,84
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.5000.000	134.5000.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.375.814	48.253.977	66,67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.375.817	48.253.977	66,67

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.743.697.397	1563.834.632	89,68
Relasi Media	23.581.378	23.452.600	99,45
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	11.981.484	11.470.250	95,73
Pelayanan Informasi Publik	57.178.000	56.759.600	99,27
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.650.956.535	1.472.152.182	89,17
Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.182.858.638	2.145.940.001	98
Koordinasi Pememfaatan Pusat data Nasional	3.400.000	-	0
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.179.458.638	2.145.940.001	98,46
Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	25.793.200	25.309.052	98,12
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah	25.793.200	25.309.052	98,12
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	17.202.858	16.585.046	96,41
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	16.176.711	15.655.847	96,78
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah			
Oprasionalisai Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1.026.147	929.199	90,55

Dari Data diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan memperoleh realisasi diatas 90%, permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 berdasarkan data realisasi keuangan dan fisik dinas komunikasi dan informatika kabupaten bolaang mongondow tahun 2024 hanya pada kegiatan Pengelolaan Data Pusat Data Pemerintah Daerah yang tidak memiliki realisasi. Hal ini disebabkan perencanaan penganggaran telah dilaksanakan oleh Pihak ke-3, sehingga anggaran yang tersedia tidak terealisasi.

Solusi tindak lanjut ke depan akan dilakukan rasionalisasi terkait perencanaan penganggaran untuk komponen belanja Aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian realisasi kinerja keuangan antara lain:

1. Kegiatan atau sub kegiatan yang diprediksi tidak dapat terlaksana dilakukan pengurangan atau penyesuaian melalui perubahan anggaran.

2. Realisasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional terserap anggaran berdasarkan kebutuhan perawatan Mobil Dinas
3. Adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi target fisik kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, laporan ini menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, laporan ini akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow, Laporan ini memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 tahun 2022.

Dari hasil analisis yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun 2025 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, apa yang telah ditargetkan di akhir tahun renstra optimis dapat tercapai.

Beberapa persoalan dan tantangan yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pada tahun mendatang antara lain:

1. Masih adanya SKPD yang memiliki sistem informasi/aplikasi namun belum terintegrasi, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dan dibuatnya regulasi yang mengatur pengadaan dan penerapan sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Masih banyaknya aparatur pemerintah yang belum mampu memanfaatkan TIK dalam kegiatannya, sehingga pelatihan-pelatihan perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas aparatur

pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.

Demikian laporan ini disusun, kiranya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi peningkatan kinerja layanan pemerintah daerah kepada masyarakat.